



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/ kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di Kota Padang Panjang khususnya.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Padang Panjang 2019 – 2023 yakni **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMURUAH DAN BERMARTABAT”**. Dimana visi tersebut mengandung makna bahwa Padang Panjang sebagai kota maju dan unggul dalam pendidikan, perdagangan dan jasa yang ditopang oleh infrastruktur pembangunan yang memadai, dan birokrasi yang handal dengan tetap berwawasan islami, adat istiadat Minangkabau dan lingkungan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Renja OPD tahun 2019 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 ini antara lain untuk :

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; dan
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Selama tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah melaksanakan 6 program dengan 27 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2017 secara fisik terealisasi sebesar 97,04 % dan realisasi keuangan mencapai 91,28%, dengan kata lain secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik.

Sementara itu pada tahun anggaran 2018 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika juga sedang melaksanakan 8 program dan 32 kegiatan. Adapun capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan kondisi tahun berjalan (2018) disajikan dalam tabel berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, urusan bidang Kominfo berperan dalam pencapaian misi ke 5 (lima) yakni MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA, dengan sasaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dirumuskan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu persentase ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berupa koneksi internet.

Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 62 % pada tahun anggaran 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu memperoleh capaian realisasi sebesar 100 % atau meningkat sebesar 161,3 % dengan kriteria sangat tinggi. Bila dilihat kaitannya dengan target akhir RPJMD pada tahun 2018 maka capaian realisasi ini sudah mencapai 142,9%.

Indikator ini menggambarkan ketersediaan jaringan internet di Kota Padang Panjang yang mencakup 24 OPD, 16 Kelurahan dan 43 sekolah. Keberhasilan capaian ini didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah terutama dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk merealisasikan ketersediaan jaringan internet/bandwith sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk perkantoran, sekolah dan beberapa lokasi strategis wifi id gratis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Untuk merealisasikan hal ini sejak akhir 2017 yang lalu Kota Padang Panjang dengan dukungan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah memulai menyelenggarakan pembangunan jaringan interkoneksi intra pemerintah yang disebut dengan Jaringan Metronet Pemerintah Kota Padang Panjang. Jaringan ini menghubungkan 24 (dua puluh empat) OPD, 16 (enam belas kelurahan), 4 (empat) Puskesmas, 3 (tiga cabang kantor), dan 4 (empat) titik CCTV Outdoor yang digunakan sebagai media pemantauan dan pengawasan lokasi publik, seluruhnya terkoneksi melalui jaringan fiber optic milik PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk dengan total bandwidth sebesar 150/150 Mbps Dedicated Access. Sementara akses jaringan intranet serta internet untuk seluruh ASN Pemerintah Kota Padang Panjang dikelola melalui gateway user manager dimana seluruh ASN memiliki akses yang sesuai privilege yang dimilikinya masing-masing.

Sementara itu, pada tahun 2018 ini juga akan disediakan 50 (lima puluh) titik wifi gratis untuk masyarakat, dimana lokasi penempatannya difokuskan pada titik kumpul masyarakat, objek wisata, sekolah, dan pasar. Untuk masing-masing titiknya disediakan bandwidth sebesar 20 hingga 60 Mbps Broadband Access. Saat ini akses yang disediakan secara gratis tersebut masih terbatas pada koneksi internet semata, namun dalam perencanaan kedepannya, jalur akses internet gratis ini akan lebih dioptimalkan lagi untuk kebutuhan komunikasi dua arah dari dan ke Pemerintah Kota dan masyarakat.

Keberadaan jaringan internet interkoneksi ini mendukung kesiapan Pemerintah Kota dalam rangka mempersiapkan diri menjadi Kota Cerdas atau SMART CITY, sebagai tindak lanjut ditunjuknya Kota Padang Panjang sebagai salah satu dari 50 kab/kota se-Indonesia dalam rangka Pendampingan Gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2019.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2017 dan 2018 dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Kominfo telah berlangsung cukup baik. Namun dengan semakin cepatnya perkembangan Teknologi dan Informasi, dan telah ditetapkannya Kota Padang Panjang sebagai Runner Up ISNA (*Indonesian Smart Nation Award*) dalam Kategori Smart Society pada bulan Mei 2018 sekaligus ditunjuk sebagai salah satu dari 50 kab/kota se-Indonesia dalam rangka Pendampingan Gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2019, maka terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun anggaran selanjutnya terdapat beberapa isu penting yang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya :

1. Regulasi daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi belum tersedia.
2. Belum tersedianya pusat data dan pengelolaan teknologi informasi (Command Centre).
3. Penyelenggaraan layanan publik yang berbasis IT masih belum maksimal.
4. SDM di bidang Teknologi Informasi baik di lingkup Dinas Kominfo maupun seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Padang Panjang masih sangat terbatas.
5. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor di lingkungan pemerintahan, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum optimal.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2019 yang harus segera ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Regulasi daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dalam hal ini berupa perda Rencana Induk E Government, pada saat ini Ranperda tentang Rencana Induk E Government sudah dalam tahapan pembahasan di DPRD.
2. Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam hal ini terutama sekali berupa command centre/data centre.
3. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, biaya, dan administrasi.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani infrastruktur jaringan TIK melalui berbagai pelatihan.
5. Peningkatan diseminasi informasi dan pola komunikasi pemerintah daerah terkait Program Pembangunan Pemerintah Daerah dan layanan publik yang diberikan, serta mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Visi kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo tahun 2015-2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan di prioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan SDM dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Terkait arah kebijakan Kota Padang Panjang untuk tahun 2019, yang tertuang dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana pada periode lima tahun ketiga (2019-2023) Kota Padang Panjang berada pada tahap persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, yaitu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Seiring dengan RPJPD tersebut maka visi pembangunan daerah kota Padang Panjang tahun 2019-2023 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang terpilih adalah sebagai berikut: **“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermuriah dan Bermartabat”**

Adapun misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi.
2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan.
3. Kesehatan : Padang Panjang Sehat dan Bahagia.
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Untuk mendukung Visi dan Misi di atas, urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian akan memberi dukungan penuh pada pencapaian misi keempat terkait Memantapkan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan penerapan kebijakan Padang Panjang “SMART CITY”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih tahun 2019 – 2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan tupoksi Dinas komunikasi

dan Informatika terkait urusan wajib pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas komunikasi dan Informatika adalah Terimplementasikannya sistim penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Elektronik (E-Government) di Kota Padang Panjang.

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya tata laksana organisasi Dinas Kominfo
2. Meningkatnya infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Meningkatnya diseminasi informasi dan berkembangnya pola komunikasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya keamanan sistem persandian
5. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 – 2023, yang meliputi 8 buah program dengan 31 buah kegiatan, adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator kinerja untuk

program ini adalah persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelayanan administrasi surat menyurat kantor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah pembelian materai guna untuk menunjang kelancaran administrasi surat menyurat kantor selama satu tahun.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan komunikasi, pemakaian air dan listrik kantor termasuk listrik 2 (dua) unit Videotron milik Pemerintah Kota Padang Panjang. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran tagihan telepon, air, listrik (kantor dan videotron), internet dan faksimili pada Dinas Komunikasi dan Informatika selama satu tahun.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi prima guna menunjang kegiatan perkantoran. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran upah, tunjangan lebaran dan premi asuransi tenaga harian sopir serta belanja jasa servis, pengantian suku

- cadang, BBM, pelumas dan biaya STNK kendaraan roda empat sebanyak dua unit, roda dua sebanyak satu unit selama satu tahun.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran honorarium pengelolaan administrasi keuangan PNS.
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kebersihan kantor. Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran upah, tunjangan lebaran dan premi asuransi tenaga harian kebersihan serta tersedianya berbagai bahan dan peralatan kebersihan untuk kebutuhan selama 1 tahun.
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat tulis kantor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan selama satu tahun.
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, kegiatan ini bertujuan untuk pencetakan dan penggandaan kelengkapan administrasi kegiatan kantor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang cetakan dan dokumen lainnya untuk keperluan administrasi kantor serta fotocopy selama 1 tahun.
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen listrik/penerangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponen listrik/penerangan untuk kebutuhan Komunikasi dan Informatika selama satu tahun.
 9. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 50 buku.

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat , kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja makan dan minum rapat serta makan minum tamu. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya konsumsi untuk rapat serta tamu selama satu tahun.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah maupun luar provinsi. Output dari kegiatan ini adalah telah diikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah atau luar provinsi selama 1 tahun.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya partisi/ sekat ruangan kantor dan pembenahan beberapa ruangan agar lebih responsive gender (ruang pelayanan, ruang sholat dan ruang ibu menyusui). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan merupakan kegiatan yang termasuk kedalam Gender Budget Statement (GBS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor, kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan komputer, printer dan lain sebagainya.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya keikutsertaan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika dalam berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan dan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun sebanyak 12 laporan.
2. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah output dari kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP, Penetapan Kinerja sebanyak 8 laporan.

5) Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Indikator kinerja untuk program ini adalah tercapainya indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi public dengan nilai 2,51-3,5 (baik), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terbentuknya KIM di Kota Padang Panjang sebanyak 10 kelompok.
2. Pembinaan dan Pengembangan Pemilihan Media Tradisional, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan media tradisional sebanyak 10 kelompok.
3. Penayangan Dialog Interaktif, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya dialog interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui pemafaatan media televisi sebanyak 4 kali dialog.
4. Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui pemanfaatan media sosial.
5. Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya konten videotron (non komersil) dan peningkatan PAD melalui retribusi sewa videotron.
6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) sebanyak 24 DIP.
7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media massa, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terpublikasikannya kegiatan pembangunan daerah melalui media massa (cetak, on line/portal, radio dan televisi) sebanyak 50 media massa.
8. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terpublikasikannya kegiatan pembangunan daerah melalui media internal Pemko dalam hal ini majalah serambi mekah, baliho dan spanduk.

9. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya laporan terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik dari layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

6) Program E-Government, Indikator kinerja untuk program ini adalah tercapainya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nilai 2,5-3,5 (baik), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan layanan akses internet dan intranet Pemerintah Kota Padang Panjang, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya 57 node/titik akses internet interkoneksi intra pemerintah.
2. Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelolanya infrastruktur teknologi yang ada di Kota Padang Panjang.
3. Pengelolaan Padang Panjang *Smart City*, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya tata kelola TI dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Smart City.
4. Pelatihan SDM TI, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan di bidang Teknologi Informasi guna meningkatkan kualitas SDM TI yang ada di Kota Padang Panjang

7) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral, Indikator kinerja untuk program ini adalah terpenuhinya ketersediaan dokumen statistic sektoral Kota Padang Panjang, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, output pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya 2 dokumen statistic sektoral dalam hal ini PDRB dan PPDA.

8) Program Persandian untuk Pengamanan Informasi, Indikator kinerja

untuk program ini adalah persentase aplikasi yang memperoleh sertifikasi keamanan digital, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, output pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya pengamanan informasi berupa 3 aplikasi yang mendapatkan SMPI.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2019 dan perkiraan maju anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN WAJIB						
1 02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1 02 1 02 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Padang Panjang	90%	925.949.000		
1 02 1 02 10 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pembelian materai		150 lb meterai 3000, 255 lb meterai 6000	2.925.000	APBD	
1 02 1 02 10 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik		Rek Telp, Air, Listrik kantor, 10 videotron	123.400.000	APBD	
1 02 1 02 10 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		4 unit kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 2	150.524.000	APBD	

1	02	1	02	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan		6 orang tenaga harian lepas	172.600.000	APBD	2 orang penjaga kantor dan 4 petugas kebersihan
1	02	1	02	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	jumlah jenis ATK		1 Paket	14.000.000	APBD	
1	02	1	02	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Cetak dokumen kantor (amplop, map dinas, disposisi, bon pesanan, fotocopy dan jilid	17.500.000	APBD	
1	02	1	02	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia		penyediaan lampu, kabel, baterai dan peralatan listrik lainnya	10.000.000	APBD	
1	02	1	02	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makan dan minum rapat		makan 900 orang peserta rapat, minum 1100 orang peserta rapat	35.000.000	APBD	
1	02	1	02	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah		1 tahun	400.000.000	APBD	

1	02	1	02	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Padang Panjang	90%	162.900.000		
1	02	1	02	10	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		pengadaan meja rapat, kursi staf, televisi, laptop, meja komputer, kursi komputer)	87.900.000	APBD	belanja meja komputer, meja rapat, tv, laptop
1	02	1	02	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	persentase sarana dan prasarana kantor yang baik dan terpelihara		rehab ruangan	50.000.000	APBD	kegiatan ini termasuk PUG (pengadaan ruang pelayanan dan sekat ruangan)
1	02	1	02	10	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	persentase alat-alat kantor dalam keadaan baik dan terpelihara		Perbaikan Komputer, Printer, lemari, meja kantor, kamera	25.000.000	APBD	
1	02	1	02	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek	Padang Panjang	100%	59.500.000		
1	02	1	02	10	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek		Pelatihan / Bimtek untuk 10 orang aparatur	59.500.000	APBD	bimtek terkait TIK (jurnalistik, media/televisi dll), perencanaan, pengelolaan barang dan

1	02	1	02	10	15		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Padang Panjang	2,51 - 3,5 (baik)	2.393.649.025		
1	02	1	02	10	15	01	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	jumlah KIM yang aktif		2 kelompok	49.450.000	APBD	Kondisi eksisting, di tahun 2017 sudah terbentuk 2 KIM
1	02	1	02	10	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Media Tradisional	jumlah Media Tradisional yang dibina		1 kelompok	125.150.000	APBD	fasilitasi seleksi media tradisional di tingkat provinsi dan nasional (agenda rutin tahunan nasional dalam SAIK/Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi), di akhir tahun 2018 ditargetkan terbentuk 4 KIM
1	02	1	02	10	15	03	Penayangan Dialog Interaktif	jumlah penyelenggaraan dialog interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui pemanfaatan media televisi		4 kali	149.850.000	APBD	3 kali dialog interaktif di media televisi lokal dan 1 kali di televisi nasional

1	02	1	02	10	15	04	Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	jumlah release berita mengenai informasi aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui pemanfaatan media sosial		360 release berita	162.657.225	APBD	termasuk honor 4 orang operator media sosial
1	02	1	02	10	15	05	Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron	Jumlah konten videotron (non komersil) dan peningkatan PAD Kota Padang Panjang melalui komersialisasi videotron		180 konten dan PAD sebesar Rp. 150.000.000,	242.176.300	APBD	termasuk honor 2 orang desain grafis, dan 2 orang Marketing
1	02	1	02	10	15	06	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	Jumlah OPD yang sudah mengelola Daftar Informasi Publik		10 OPD	137.750.000	APBD	Dalam rangka reformasi birokrasi terkait pemenuhan keterbukaan informasi publik
								Jumlah peserta bintek PPID dan jumlah kelengkapan sekretariat PPID		50 peserta sosialisasi dan 1 paket kelengkapan sekretariat PPID			Peserta bintek adalah seluruh PPID pembantu
1	02	1	02	10	15	07	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui media	jumlah media massa yang mempublikasikan informasi kegiatan pembangunan daerah		56 media (42 media cetak, 10 portal on line, 2 radio dan 2 televisi)	1.243.615.500	APBD	Pada tahun 2018, 50 media (42 media cetak, 5 portal on line, 2 radio dan 1 televisi)

						massa							
1	02	1	02	10	15	08	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	jumlah penerbitan majalah Serambi Mekkah		12 Edisi majalah Serambi Mekah	283.000.000	APBD	penerbitan majalah Serambi Mekkah dan penyediaan baliho/spanduk
		1	02	10	15	09	Pembinaan dan Pelatihan Badan Koordinasi Kehumasan	jumlah peserta pelatihan		50 (24 OPD, 16 Kelurahan, 10 Instansi Vertikal)	23.000.000	APBD	materi terkait teknis publikasi kegiatan di OPD bagi kasubag umum dan kepegawaian
1	02	1	02	10	16		Program e-Government	indeks SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik)	Padang Panjang	2,5 - <3,5 (Baik)	4.121.126.000		
1	02	1	02	10	16	01	Pengelolaan Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah Node Akses Internet yang dikelola		54 Node (28 titik OPD, 16 Kelurahan, 4 puskesmas, 2 Videotron, 4 CCTV)	1.668.950.000		di tahun 2018 sudah tersedia 51 node meliputi 28 titik OPD, 16 kelurahan, 4 puskesmas, 3 CCTV, 1 videotron dengan kapasitas bandwidth 150/150 mbps

								Jumlah layanan sms LBA/Profiling		1 tahun			berisikan informasi mengenai kegiatan dan event pemerintah daerah
								sewa hosting		1 tahun			untuk infrastruktur website
1	02	1	02	10	16	03	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi (command centre)	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang dikelola		5 jenis infrastruktur TI (3 lokasi Videotron, 54 Node jaringan, 9 server, 30 acces point dan 44 buah router)	1.874.150.600		pemeliharaan infrastruktur TI
								jumlah data centre/command centre		1 command centre			terdiri dari 1 set (9 unit) video wall, sound system 1 set, 3 unit komputer operator dan honor 3 orang tim pengelola jaringan
								jumlah CCTV online ke command center yang diadakan		44 unit			peruntukan untuk 24 OPD, 16 Kelurahan dan 4 puskesmas
1	02	1	02	10	16	04	Pengelolaan Padang Panjang Smart City	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi		6 Aplikasi terintegrasi dalam manajemen smart city	434.651.400		biaya honor 7 orang tenaga Teknis IT

1	02	1	02	10	16	05	Pelatihan SDM di bidang Teknologi Informasi	jumlah peserta pelatihan		300 peserta	143.374.000		materi pelatihan terkait jaringan dan sistim informasi untuk operator OPD dan kelompok masyarakat
							Program Persandian dan Pengamanan Informasi	Persentase opd yang mengimplementasikan sistem persandian	Padang Panjang	100%	23.520.000		
1	02	1	02	10	18	01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	jumlah opd yang menerapkan tanda tangan digital		8 OPD	23.520.000		
1	02	1	02	10	17		Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang disusun	Padang Panjang	100%	60.335.000		
1	02	1	02	10	17	01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan		2 dokumen (PDRB dan PPDA)	60.335.000		
Jumlah Anggaran Program Prioritas 1									7.748.779.025				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2019, hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kotan Padang Panjang telah dapat menyusun rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2019, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun 2019.

Untuk anggaran tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 8 (delapan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



MARWILIS, SH, M.Si
NIP. 19610703 198203 1 008